



Ahok Bekukan Anggaran

JAKARTA (Pos Kota) - Gubernur Ahok geram karena masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nekat mark up anggaran. Padahal, APBD DKI telah menggunakan sistem e-budgeting.

"Masih banyak yang enggak tahu aturan," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Ahok mengaku telah menyisir mata anggaran dalam APBD 2015. Jika ditemukan kejanggalan, maka akan langsung dibekukan, sehingga anggaran tersebut tidak bisa digunakan. "Kami sisir semua mana yang tidak benar dibuang saja. Lebih baik serapannya kecil tapi duitnya tidak dicuri," tegasnya.

KECURANGAN LAIN

Selain mark up anggaran pada harga satuan, Ahok mencurigai ada kecurangan lain yang dilakukan SKPD. Di antaranya yakni dari sisi kegunaan serta kekuatan gedung yang berlebihan. Para SKPD disinyalir meningkatkan total anggaran agar komisi yang diperolehnya juga ikut tinggi.

"Misalnya kita bangun sekolah mungkin cukup dengan konstruksi baja untuk 3-4 lantai. Tidak perlu sampai masih ada beton, terus dicor segala macam. Itu jadi mahal. Kenapa dia mau mahal? Supaya dia dapat komisinya gede. Kita mau bertahap motong-motong seperti itu," tandasnya.

Ia mengakui masih adanya kelemahan pada sistem e-budgeting tahun ini. Karena semua jenis kegiatan tidak dimasukkan melalui elektronik musyawarah rencana pembangunan (e-musrenbang). Namun pengalaman tahun ini akan dijadikan pembelajaran bagi penerapan e-budgeting tahun depan. (john/guruh/st/o)